

# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATIYOSO

Alamat : Jln. Raya Jatipuro – Jatiyoso, Telp. (0271) 495039 ext. 320, Fax. (0273) 3201320  
Website : [jatiyoso.karanganyarkab.go.id](http://jatiyoso.karanganyarkab.go.id), E-mail : [jatiyoso@karanganyarkab.go.id](mailto:jatiyoso@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57785

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso Tahun 2025.

Selaku Organisasi Perangkat Daerah yang berada di wilayah, kami berupaya dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta tugas-tugas lainnya yang diserahkan kepada kami selaku Camat. Adapun berbagai kegiatan selama Tahun 2025 yang telah kami laksanakan tergambar pada buku laporan ini, baik keberhasilan maupun kendala yang kami hadapi.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso ini, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Pegawai Kantor Kecamatan Jatiyoso dan pihak-pihak yang telah membantu penyusunannya. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan baik pada isi maupun tata bahasa penyusunan kalimat, untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan semoga Laporan Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso ini bermanfaat sehingga lebih meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Jatiyoso.

Jatiyoso, Januari 2026



CAMAT JATIYOSO

MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M.

Penata Tingkat I

NIP. 197312101998031008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II DISKRIPSI OPD .....	4
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Jatiyoso .....	5
C. Standard Operating Procedure (SOP) Kecamatan Jatiyoso .....	5
D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	6
E. Organisasi .....	6
F. Kepegawaian .....	8
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	12
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....	13
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....	30
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	31
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN .....	32
BAB VIII PENUTUP .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Tugas Camat Jatiyoso pada tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Kecamatan Jatiyoso dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan.

Dokumen Renstra ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. RPJMD tersebut menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis agar sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah, kedudukan Renstra Perangkat Daerah memiliki posisi strategis yang berfungsi menghubungkan perencanaan makro dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih teknis dan

Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso tersebut ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan setiap tahun yaitu berupa dokumen Rencana Kerja Tahun 2025. Hal ini dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan Kecamatan Jatiyoso yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transparansi adalah keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap

setiap informasi terkait, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Termasuk juga pertanggungjawaban terhadap kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat.

Pemerintah Kecamatan Jatiyoso adalah bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, untuk itu berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiyoso adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

## B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Camat ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 11);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 lampiran XXI tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13) ;

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Tahunan ini adalah harapan untuk mencapai Program/kegiatan Kecamatan Jatiyoso yang dilaksanakan dan tanggungjawab OPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.

#### 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan LPT merupakan pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025. LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Jatiyoso yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaranh serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OPD**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Bab III Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Jumlah Program Nasional Yang dilaksanakan Oleh Kecamatan Jatiyoso :  
Tidak Ada**

**C. Standard Operating Procedure (SOP) Kecamatan Jatiyoso**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan bagi Kecamatan Jatiyoso untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan prosedur. SOP yang telah dibuat antara lain :

1. SOP Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2. SOP Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
3. SOP Prosedur Administrasi Pengajuan KTP
4. SOP Prosedur Layanan Legalisasi Surat-surat dan Rekomendasi Surat-surat
5. SOP Pelayanan Legalisasi / Rekomendasi Pengantar Ijin Keramaian
6. SOP Surat Ijin Penelitian
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja
8. SOP Penyusunan SPJ Keuangan
9. SOP Penyusunan RKA dan DPA
10. SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
11. SOP Penerbitan DP3 PNS
12. SOP Penerbitan DP3 Eselon IV (Kasi)
13. SOP Permohonan Penerbitan Kartu Kepegawaian
14. SOP Permohonan Penerbitan Dokumen Kepegawaian (Pengajuan Pensiun, Kenaikan Pangkat, dll)
15. SOP Permohonan Cuti PNS



#### **D. Perda/Perbub yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan**

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13).

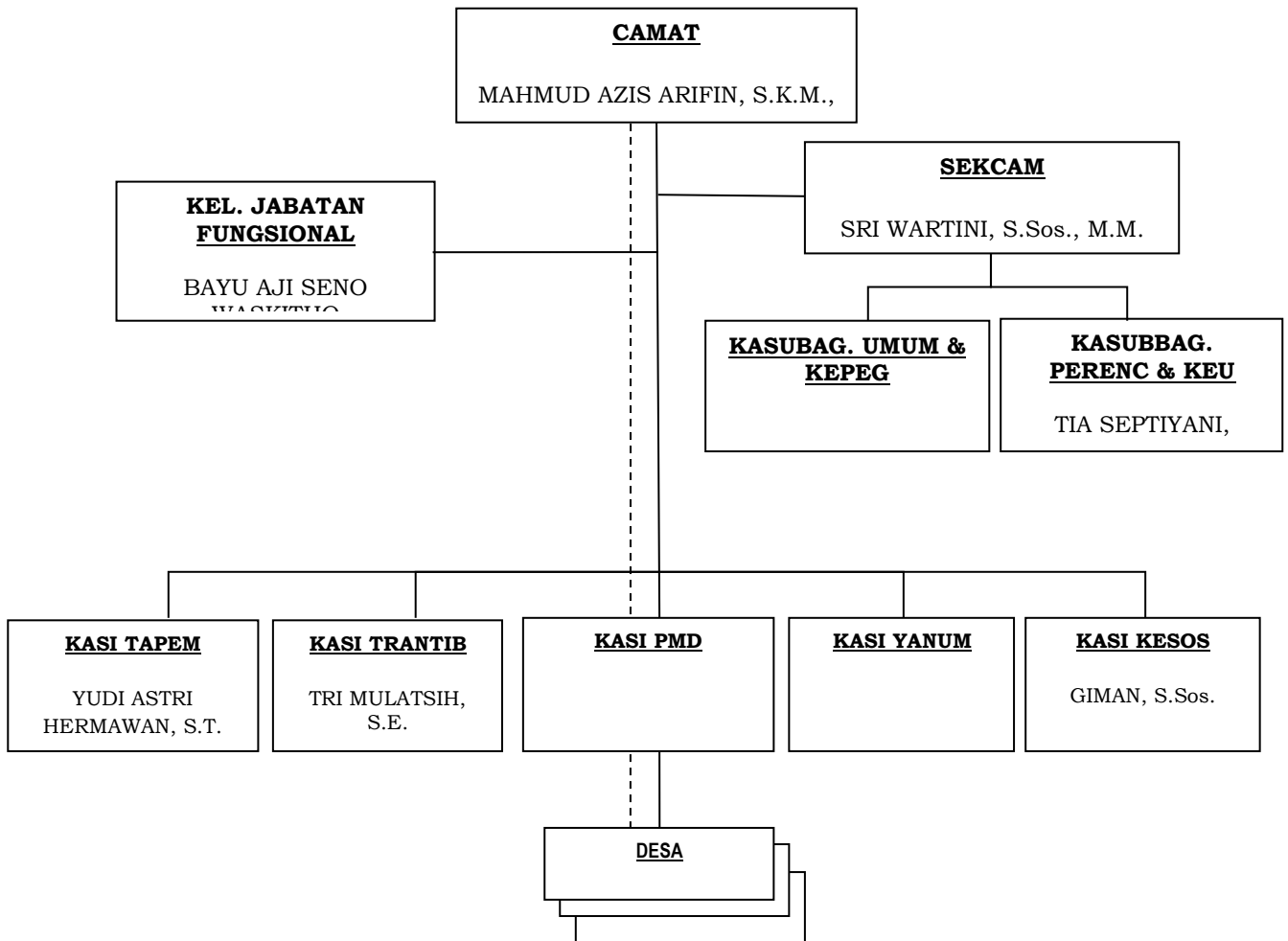
#### **E. Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Jaatiyoso terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Jatiyoso sebagai berikut:



Ket : \_\_\_ Garis Komando

---- Garis Koordinasi

## F. KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data Kepegawaian di Kecamatan Jatiyoso dapat kami deskripsikan sebagai berikut :

### 1. Jumlah Pegawai Kecamatan Jatiyoso Keseluruhan :

NO	NAMA	NIP	STATUS CPNS/ PNS	PANGKAT/ GOL
1	MAHMUD AZIZ ARIFIN, S.K.M., M.M.	197312101998031008	PNS	Penata Tk.I (III/d)
2	SRI WARTINI, S.Sos., M.M.	197607281998032002	PNS	Penata Tk.I (III/d)
3	YUDI ASTRI HERMAWAN, S.T.	198308312009021005	PNS	Penata Tk.I (III/d)
4	GIMAN, S.Sos.	197009091989031001	PNS	Penata Tk.I (III/d)
5	TRI MULATSIH, S.E.	197909212011012008	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
6	TIA SEPTIYANI, A.Md.	198609192010012025	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
7	SUNARDI	197401042008011004	PNS	Penata Muda (III/a)
8	SRIYATNO	197001082009061001	PNS	Penata Muda (III/a)
9	BAYU AJI SENO WASKITHO, A.Md.Kom.	199904102025051001	CPNS	Pengatur (II/c)
10	MURTOYO	198611032012121002	PNS	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
11	TEGAR SAKTI MUKTI SADONO, A.Md.	199309302025211030	PPPK	VII
12	AGUNG HARIMURTI WIDODO, S.Kom.	199005122025211103	PPPK PW	
13	SRI MURTINI	199702052025212046	PPPK PW	
14	WAHYU WIDHI HASTONO	199108122025211078	PPPK PW	
15	WAHYU RIYA MAHENDRA, A.Ma.Pust	198905032025211129	PPPK PW	
16	FEBRI PUGUH RAMADAN	199502192015211050	PPPK PW	
17	WIBOWO PAMUNGKAS	199108082025211138	PPPK PW	

18	SUTOPO ANDI PURNOMO, S.E.	199108122025211060	PPPK PW	
19	MUCHSIN ALHUDA	199412182025211065	PPPK PW	
20	JOKO SUSILO	199901152025211041	PPPK PW	
21	TRI WAHYU MUGI RAHARJO	199002192025211083	PPPK PW	
22	WISNU JOKO PURNOMO	199707062025211062	PPPK PW	
23	AULIA AYU ATIKA PUTRI	200004122025212029	PPPK PW	
24	AGUS PURWANTO	199702022025211061	PPPK PW	
25	NITA SURYANINGSIH	200303102025212010	PPPK PW	
26	HERI SETIAWAN	199807112025211064	PPPK PW	
27	RIDWAN ALFIN FAUZI	199801252025211038	PPPK PW	
28	EKO PURWANTO	198307312025211043	PPPK PW	

## 2. Jumlah Pegawai Struktural SKPD Yang Terisi :

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Memenuhi Persyaratan DIKLATPIM	Memenuhi syarat Kependidikan
1	MAHMUD AZIZ ARIFIN, S.K.M., M.M.	Camat	√	√
2	SRI WARTINI, S.Sos., M.M.	Sekcam	√	√
3	YUDI ASTRI HERMAWAN, S.T.	Kasi Tapem	√	√
4	TRI MULATSIH, S.E.	Kasi Trantib	√	√
5	GIMAN, S.Sos.	Kasi Kesos	√	√
6	TIA SEPTIYANI, A.Md.	Kasubag Perenc Keu	√	√

## 3. Daftar Pejabat Struktural SKPD yang Belum Terisi :

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Eselon
1		Kasi PMD	IV



2		Kasi YANUM	IV
3		Kasubag UMPEG	IV

**4. Daftar Pejabat Fungsional Umum :**

NO	NAMA	NIP	Nama Jabatan Fungsional
1	SUNARDI	197401042008011004	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	SRIYATNO	197001082009061001	Pengelola Administrasi Pemerintahan
3	MURTOYO	198611032012121002	Penata Laporan Keuangan

**5. Daftar Pejabat Fungsional Tertentu :**

NO	NAMA	NIP	Nama Jabatan Fungsional Tertentu
1	BAYU AJI SENO WASKITHO, A.Md.Kom.	199904102025051001	Pranata Komputer

**6. Daftar Pejabat Fungsional Umum yang belum terisi :**

NO	Nama Jabatan Fungsional Umum	Jumlah
1	Pengolah Data Dan Informasi TAPEM	1
2	Pengolah Data Dan Informasi TRANTIB	2
3	Pengelola Layanan Operasional TRANTIB	1
4	Pengolah Data Dan Informasi PMD	1
5	Pengolah Data Dan Informasi KESOS	2
6	Pengolah Data Dan Informasi YANUM	2
7	Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil	1
8	Penelaah Teknis Kebijakan Perencanaan Dan Keuangan	2

9	Pengolah Data Dan Informasi Perencanaan Dan Keuangan	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan UMPEG	1
11	Pengolah Data Dan Informasi UMPEG	2
12	Pengadministrasi Perkantoran	2
13	Operator Layanan Operasional	2
	Jumlah	20 formasi

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

*Nihil*

**B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

*Nihil*

**C. URUSAN PILIHAN**

*Nihil*

**D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**

*Nihil*

## BAB IV

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 280.000,00 Realisasi: Rp. 280.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 900.000,00 Realisasi: Rp. 900.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 1 tahun	1 tahun (100%)		
			c. PROGRAM	1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Laporan	2 dokumen		



			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD Anggaran: Rp. 800.000,00 Realisasi: Rp. 800.000,00 Persentase: (100,00%)	Penyusunan Dokumen DPA SKPD 2 dokumen	(100%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 315.000,00 Realisasi: Rp. 300.000,00 Persentase: (95,24%)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 5.200.000,00 Realisasi: Rp. 5.195.000,00 Persentase: (99,90%)	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 8 unit	8 unit (100%)		

			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 7.978.750,00 Realisasi: Rp. 7.003.350,00 Persentase: (87,78%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 dokumen	12 dokumen (100%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.757.000,00 Persentase: (99,03%)	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan 1 unit	1 unit (100%)		
				2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 35.162.500,00 Realisasi: Rp. 34.885.000,00 Persentase: (99,21%)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 2 unit	2 unit (100%)		

			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 27.658.500,00 Realisasi: Rp. 27.658.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 13.268.000,00 Realisasi: Rp. 13.067.800,00 Persentase: (98,49%)	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100%)		

			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 1.741.490.434,00 Realisasi: Rp. 1.450.747.493,00 Persentase: (83,30%)	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 14 bulan	14 bulan (100%)		
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 33.000.000,00 Realisasi: Rp. 26.133.774,00 Persentase: (79,19%)	Jumlah laporan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan	12 laporan (100%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 80.640.000,00 Realisasi: Rp. 77.280.000,00 Persentase: (95,83%)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan	12 laporan (100%)		



			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 44.210.500,00 Realisasi: Rp. 44.094.525,00 Persentase: (99,74%)	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan 6 unit	6 unit (100%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 1.800.000,00 Realisasi: Rp. 1.800.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah laporan jasa surat menyurat 12 laporan	12 laporan (100%)		

			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 13.726.300,00 Realisasi: Rp. 13.726.300,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100%)		
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 21.956.650,00 Realisasi: Rp. 21.956.650,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 bulan	12 bulan (100%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 71.695.000,00 Realisasi: Rp. 71.695.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 laporan (100%)		

			m. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 4.647.700,00 Realisasi: Rp. 4.647.700,00 Persentase: (100,00%)	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen, jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen	1 dokumen, 1 dokumen (100%)		
--	--	--	---	---	--	-----------------------------	--	--

**B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

*Nihil*

**C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

*Nihil*

**D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

*Nihil*

**E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**



*Nihil*

**F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

*Nihil*

**G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

*Nihil*

**H. UNSUR KEWILAYAHAN**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KECAMATAN		a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 53.300.000,00 Realisasi: Rp. 53.300.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 dokumen	12 dokumen (100%)		
				2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaran: Rp. 3.180.000,00 Realisasi: Rp. 3.180.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 dokumen	6 dokumen (100%)		

			3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Anggaran: Rp. 1.900.000,00 Realisasi: Rp. 1.900.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pandayagunaan Aset Desa 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
			4) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Anggaran: Rp. 2.200.000,00 Realisasi: Rp. 2.200.000,00 Persentase: (100,00%)	jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 1 dokumen	1 dokumen (100%)		

		b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan	1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 39.425.650,00 Realisasi: Rp. 39.425.650,00 Persentase: (100,00%)	jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan 12 dokumen	12 dokumen (100%)		
		c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran: Rp. 150.000.000,00 Realisasi: Rp. 149.838.362,00 Persentase: (99,89%)	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 1 dokumen	1 dokumen (100%)		

		d. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Anggaran: Rp. 3.975.000,00 Realisasi: Rp. 3.975.000,00 Persentase: (100,00%)	jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional 35 orang	35 orang (100%)		
			2) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Anggaran: Rp. 104.131.800,00 Realisasi: Rp. 102.495.800,00 Persentase: (98,43%)	jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 115 orang	115 orang (100%)		
		e. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 28.730.250,00 Realisasi: Rp. 27.130.250,00 Persentase: (94,43%)	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 3 laporan	3 laporan (100%)		

	f. PROGRAM P ENYELENGG ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran: Rp. 2.500.000,00 Realisasi: Rp. 2.500.000,00 Persentase: (100,00%)	jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan 2 dokumen	2 dokumen (100%)		
	g. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Anggaran: Rp. 10.057.500,00 Realisasi: Rp. 10.057.500,00 Persentase: (100,00%)	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 3 Lembaga	3 Lembaga (100%)		

		h. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Anggaran: Rp. 17.977.650,00 Realisasi: Rp. 17.971.350,00 Persentase: (99,96%)	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
		i. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Anggaran: Rp. 1.900.000,00 Realisasi: Rp. 1.900.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa 6 dokumen	6 dokumen (100%)		
		j. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Anggaran:	jumlah laporan hasil sinertigritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan (100%)		

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 134.790.000,00 Realisasi: Rp. 134.790.000,00 Persentase: (100,00%)	12 Laporan			
--	--	----------------------------------	--	------------	--	--	--

**I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

*Nihil*

**J. UNSUR KEKHUSUSAN**



## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan yang diterima**

Kecamatan Jatiyoso sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat diwilayah, sejak ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tidak lagi mendapat pelimpahan tugas pembantuan yang harus dilaksanakan.

#### **B. Tugas pembantuan yang diberikan**

Karena tidak ada tugas pembantuan yang diterima, maka tidak ada pula tugas pembantuan yang diserahkan/diberikan.

## **BAB VI**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Pada Kecamatan Jatiyoso untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 : N I H I L.

## BAB VII

### INOVASI DAN PENGHARGAAN

#### A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
-----	--------------	-----------

#### B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
-----	------------------	------------------------------

## BAB VIII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Secara umum Camat Jatiyoso dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025 sesuai tupoksinya dengan baik, seperti indikatornya antara lain :

- a. Telah berjalannya penyelenggaraan pemerintahan s/d tingkat desa cukup efektif dan efisien;
- b. Telah dilakukannya tugas-tugas koordinatif dalam bidang pembangunan wilayah;
- c. Telah dilaksanakannya tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan bersama instansi terkait;
- d. Telah diselenggarakannya tugas-tugas umum pemerintahan dengan cukup baik.

### B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga sangat dibutuhkan demi kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang berbasis IT. Sehingga pelayanan terhadap Masyarakat dapat berjalan optimal sesuai dengan tata Kelola pemerintahan dan standar birokrasi yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025 ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Jatiyoso, Januari 2026

CAMAT JATIYOSO



MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197312101998031008